

ABSTRAK

Permintaan Hak bukanlah hak penyelidikan dalam konteks penegakan hukum seperti yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ketika diselidiki Bulogate, kasus KPK, dan lainnya. Permintaan hak ini tidak dimaksudkan untuk menemukan bukti awal dugaan tindak pidana dilakukan. Ini akan menyelidiki keadaan pemerintahan yang baik untuk mengetahui pelaksanaan tugas pemerintah dan penganggaran negara. Hal ini juga untuk mencari bahan dari rumusan kebijakan termasuk penyelidikan orang untuk mengisi posisi yang memerlukan persetujuan dan pertimbangan DPR.

Kata Kunci: Pengawasan, Hak Angket, DPR

ABSTRACT

The inquiry right is not the right of investigation in the context of law enforcement as conducted by the House of Representatives (DPR) when it investigated Bulogate, KPK case, and others. To The inquiry right is not intended to find early evidence on the allegations of a criminal act has conducted. It will investigated the state of good governance in order to know the performance of duties of the government and state budgeting. It is also to look for the materials of policies formula, including an investigation of people to fill position that require approval and consediration of DPR

Keyword: